

DAFTAR PUSTAKA

Buku.

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Filsafat Hukum*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anand, Ghansham. 2018. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Budiono, Herlein. 2013. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. , Citra Adiya Bakti, Bandung.
- Gadjong, Agus Salim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah (Kajian Politik dan hukum)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. 2017 *Buku Arahkan Kantor Staf Presiden: Prioritas Nasional Reforma Agraria dalam Rencana Kerja Pemerintah*. Jakarta.
- Kartodihardjo, Hariadi. 2018. *Merangkai Stanza Lagu Kebangsaan: Esai-esai Reflektif dalam Kuasa Pengetahuan, Politik PSDA, dan Problematika Kebijakan*. Forest Watch Indonesia, Bogor.
- Harsono, Boedi. 2006. *Hukum Agraria Indonesia Edisi Revisi* Penerbit Djambatan, Jakarta
- H.S, Salim. 2018. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ilham, Muhammad. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- MD, Moh. Mahfud. 2011. *Politik Hukum di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nashih, Ahmad (editor). 2015. *Asas-asas Keagrariaan*. STPN Press, Yogyakarta.

- Nurlinda, Ida. 2009. *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Otto, Jan Michiel. 2003. *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.
- Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019, diterbitkan Oleh, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2007. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Rahardjo, Sadjipto. 2006. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta.
- Rachman, Noer fauzi. 2012. *Land reform dari masa ke masa*, Penerbit STPN Press.
- _____. dan Usep Setiawan (Penyunting). 2015. *Buku putih reforma agraria "Reforma Agraria Untuk Kemandirian Bangsa"* Konsorsium Pembaharuan Agraria, Jakarta.
- Rawls, John. 2006 *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara* (Terjemahan: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Riyadi, Slamet. 2014. *Buku Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang KPHL Model Sijunjung Tahun 2014-2023*, KPHL Model Sijunjung, Sijunjung.
- Shohibudin, Mohammad (ed). 2009. *Metodologi Studi Agraria Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Sajogyo Institute Yogyakarta.
- Sitorus, MT. Felix (et.al).2002. *Menuju Keadilan Agraria*, Yayasan Akatiga, Bandung.

Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.

_____, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soemitro, Ronny H. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Penerbit Ghalia, Jakarta.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2018. *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Vollenhoven, C. Van. 2013. *Orang Indonesia dan Tanahnya*,(Terjemahan Soewargono). Sajogyo Institute, Bogor.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika, Jakarta.

Warman, Kurnia *et.al*, 2012. *Studi Kebijakan Penguatan Tenurial Masyarakat dalam Penguasaan Hutan*, Penerbit World Agroforestry Centre.

_____, 2009. *Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi Pemerintahan Di Sumatera barat*, Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

_____. 2010. *Hukum agraria dalam masyarakat majemuk: Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat*, HuMa, Jakarta.

_____, 2018. *Dokumen Hukum Reforma Agraria di Kawasan Hutan*,

Makalah ini disampaikan di Lingkar belajar Bersama Reforma Agraria

(LIBBRA), Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Yogyakarta, 24 Agustus 2018.

Wibowo, Lukas dan Ismanul hakim (Editor.). 2014. *Hutan Untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria di Sektor Kehutanan*. LKiS, Yogyakarta.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Reformasi Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir edisi revisi*. INSIST Press-KPA-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____ 2009 *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta.

Yusuf, Abdul Muis. dan Mohammad Taufik Makarao. 2011. *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Direktorat Jendral Penataan Agraria. *Buku Petunjuk Teknis Kegiatan Landreform Tahun 2019*, Kementrian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional.

Buku Petunjuk Teknis Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat dalam Skema Akses Mengikuti Aset atau Dalam Skema Aset Mengikuti Akses di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1964 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan pemberian ganti kerugian.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor:837/ Kpts/Um/11/1980 tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.180/ Menlhk/ Setjen/kum.1/4/2017 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen /KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk TORA

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 35/Menhut-II/2013 tentang Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Provinsi Sumatera Barat perubahan dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat seluas 4.229.730 Ha,

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 Tahun 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang penunjukan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 ha

Keputusan Menteri LHK Nomor SK.424/MenLHK-/Setjen/PLA.2/6/2016 sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan dari kawasan hutan

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 79/SK-LR.07/I/2019 tentang pembentukan tim GTRA Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK 72/MENLHK/Setjen/PLA.2/I/2019 Tentang Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang dapat Dikonversi Tidak Produktif untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria di Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 331/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat seluas ±150.492.

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 1997 Tentang Penertiban Tanah-Tanag Objek Redistribusi Landreform.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor : 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Model Kabupaten Sijunjung.

Maklumat Persetujuan Pemberian Tanah Objek Reforma Agraria Dari Kawasan Hutan Melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) yang Tidak Produktif

Keputusan Kepala Kanwil BPN Sumbar Nomor 182/Kep-13.12/ IX/ 2018 tentang penetapan lokasi kegiatan redistribusi tanah objek *landreform*

Jurnal

Noer fauzi rachman, *Gelombang Reforma diawal Abad Ke 21*, Jurnal *Landreform* Vol I, 12 Mei 2014, Konsorsium Pembaharuan Agraria.

Dokumen lainnya

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2015. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan, Jakarta.

Laporan Progres Penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria Februari 2018, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Jakarta.

Website

<http://m.sigapnews.co.id/read-9540-2018-06-08-sumbar-targetkan-penyelesaian-program-tora-seluas-7078575-hektar-pada-2019.html#sthash.K0Xb1y5Y.dbps>

<https://sumbar.antarane.ws.com/berita/223071/seluas-14220-hektare-hutan-untuk-tora-di-sijunjung> diakses pada tanggal 19 oktober 2019